

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 3/MUNAS XI/MUI/2025

Tentang

STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula – 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

- MENIMBANG : a. bahwa dalam praktik kehidupan modern telah berkembang penggunaan kartu uang elektronik (*e-money, Brizzi, Flazz, TapCash*, dan sejenisnya) sebagai alat pembayaran dan penyimpanan nilai untuk memudahkan transaksi keuangan;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, sering terjadi kerusakan kartu atau kehilangan kartu uang elektronik yang menimbulkan permasalahan hukum terkait status saldo yang tersimpan di dalam kartu tersebut, baik dari sisi kepemilikan maupun tanggung jawab pihak penerbit dan pemilik;
- c. bahwa saldo uang kartu elektronik pada hakikatnya merupakan harta (*māl*) milik pengguna yang dititipkan atau dipinjamkan kepada penyelenggara jasa keuangan, sehingga segala bentuk pengelolaan, pengurangan, atau penghapusan nilai harus dilandasi akad yang sah dan disertai dengan ridha (kerelaan) pemilik; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 memandang perlu menetapkan fatwa tentang Status Saldo Kartu Uang Elektronik Yang Hilang untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT.

- a. Ayat-ayat tentang larangan bermuamalah dengan cara yang batil, antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa [4]: 29)

- b. Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam dosa, antara lain:
 ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

- c. Ayat tentang tata cara melakukan transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (Q.S. Al Baqarah (2): 282)

- d. Ayat tentang perintah untuk menepati setiap akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman ! Tunaikanlah akad-akad itu -.." (Q.S. Al Maidah (5):1)

- e. Ayat al-Qur'an tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (Q.S. Al-Nisa' (4): 58)

- f. Ayat al-Qur'an yang menekankan kewajiban menegakkan keadilan, antara lain;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90)

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis yang melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ؛ رواه أحمد وابن ماجه

"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (H.R Ahmad dan Ibnu Majah)

- b. Hadis tentang perintah untuk menepati kesepakatan dalam perjanjian antara lain:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"dari Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Abu Dawud)

c. Hadis tentang larangan perbuatan zalim:

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

"Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." (HR. Muslim)

d. Hadis tentang barang temuan (luqathah), antara lain:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُبَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ التَّقَطَّ لُقْطَةً فَلْيُعْرِفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا وَإِلَّا فَلْيُعْرِفْ عَدَدَهَا وَوَكَّاءَهَا ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُرُدَّهَا عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barang siapa menemukan barang hilang (luqatah), hendaklah ia mengumumkannya selama satu tahun. Jika pemiliknya datang (dalam setahun itu), maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak datang, maka hendaklah ia mengetahui jumlah (nilainya) dan pengikatnya (ciri-cirinya), kemudian boleh ia memakannya (memanfaatkannya). Namun jika suatu saat pemiliknya datang, maka wajib ia mengembalikannya kepada pemiliknya." Hadis Riwayat Muslim." (H.R. Muslim)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُبَنِيِّ رضي الله عنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ: اعْرِفْ وَكَّاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

"Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu 'anhu Rasulullah ditanya tentang barang temuan berupa emas atau perak, lalu beliau bersabda: 'Kenali pengikatnya dan bungkusannya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka manfaatkanlah, namun tetaplah menganggapnya sebagai titipan. Jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya.' Kemudian beliau ditanya tentang unta yang tersesat, maka beliau bersabda: 'Apa urusanmu dengannya? Biarkan saja, karena ia memiliki sepatu dan tempat minumnya sendiri. Ia bisa pergi ke sumber air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.' Beliau juga ditanya tentang kambing, maka beliau bersabda: 'Ambillah! Karena kambing itu bisa menjadi milikmu, milik saudaramu, atau milik serigala.'" (HR Bukhori-Muslim).

e. Hadis tentang larangan untuk mengambil harta tanpa hak, di antaranya:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Dari Abu Hurrah ar-Ruqāsyi, dari pamannya radhiyallāhu 'anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dari dirinya sendiri." " (HR. Ahmad)

f. Hadis tentang perintah menunaikan amanah, antara lain:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan sesuatu kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi no. 1264 – dan dinilai hasan (baik) oleh at-Tirmidzi.)

g. Hadis tentang larangan jual beli yang mengandung gharar:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau risiko tinggi yang tidak wajar)". (HR. Ahmad bin Hanbal)

h. Hadis yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam dalam pengelolaan sumber daya umat:

عَنْ حَوَلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Dari Khawlah al-Anshariyyah radhiyallāhu 'anhā, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ada orang-orang yang mempermainkan (mengutak-atik, memakai sembarangan) harta Allah tanpa hak. Maka bagi mereka neraka pada Hari Kiamat." (H.R Bukhori)

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ

"Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْعًا

"Sesuatu yang sudah dikenal (menjadi kebiasaan/'urf) itu seperti syarat yang ditetapkan secara syariat."

إِنَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersamanya adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat..." (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

مِنَ الدَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُتَرَتِّبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ، فَإِذَا تَغَيَّرَتْ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ.

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar mengikuti illatnya, baik ketika illat itu ada maupun ketika illat itu tidak ada”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

الْأَمْوَالُ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Harta tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali dengan sebab yang sah secara syar’i.”

مَنْ حَازَ مَالًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ

“Barang siapa yang memegang harta milik orang lain, maka harta itu menjadi amanah di tangannya.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“Bahaya khusus boleh ditanggung untuk menghilangkan bahaya yang lebih besar (umum).”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para fuqaha, antara lain:

- a. Pendapat yang mengandung makna tentang bolehnya penggunaan uang elektronik, antara lain:

- 1) Pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanūkhī, Jilid 3, Halaman 90:

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُ أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ نَظَرَةً.

“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”.

- 2) Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muḥallā*, Imam Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusī, Jilid 8, Halaman 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَهُوَ تَمَنُّ ... وَلَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِقْتِصَارُ بِالثَّمَنَيْنِ عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ...

“Segala sesuatu yang boleh dijual, maka ia boleh dijadikan harga (alat tukar) ... Dan kami tidak tahu dari mana datangnya pembatasan kalian bahwa alat tukar hanya terbatas pada emas dan perak, padahal tidak ada nash (teks syariat) yang menetapkannya.”

- b. Pendapat Imam al-Nawawi di kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 11, hlm. 5, Beirut: Dār al-Ma’rifah tentang larangan mengambil harta orang lain tanpa hak:

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِ لَا تَحِلُّ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، وَأَنَّهُ إِذَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ غَاصِبًا وَضَمِنَ الْمَالُ

Al-Imām an-Nawawī rahimahullāh berkata:

“Para ulama sepakat bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaannya. Barang siapa mengambilnya tanpa izin, 6manah6 telah melakukan perampasan (ghasb) dan wajib menanggung (mengganti) harta tersebut.”

- c. Pendapat al-Imām al-Qurṭubī tentang 6manah dan kewajiban menjaganya di kitab *al-Jāmi’ li aḥkām al-Qur’ān*, juz 5, hlm. 256, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah:

قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَمَانَةُ تَجِبُ رِعَايَتُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَمَنْ فَرَطَ فِيهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، لِأَنَّهُ تَعَدَّى عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ

“Amanah wajib dijaga dalam segala hal. Siapa yang meremehkannya, 6manah6 wajib mengganti (menanggung kerugian), karena hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain.”

- d. Pendapat al-Imām Ibn Qudāmah tentang kewajiban mengganti kerugian (Dhamān) dalam titipan, di kitab *al-Mughnī*, juz 4, hlm. 239, Beirut: Dār al-Fikr):

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ أَوْ فَرَطَ، ضَمِنَ، لِأَنَّهُ تَعَدَّى فِي الْأَمَانَةِ، وَالْأَمَانَةُ لَا تَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوْ التَّفْرِيطِ

“Apabila orang yang diberi titipan (mustawda’) berbuat melampaui batas atau lalai, 6manah6 wajib mengganti rugi. Sebab, 6manah tidak menimbulkan tanggungan kecuali karena pelanggaran atau kelalaian.”

- e. Pendapat al-Imām asy-Syātibī tentang hak kepemilikan tidak gugur dengan waktu, di kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*, juz 2, hlm. 10, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah):

قَالَ الْإِمَامُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَمْوَالُ مِمَّا يُحْفَظُ فِي الشَّرِيعَةِ، وَلَا يَزُولُ حَقُّ صَاحِبِهَا إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ صَحِيحٍ

“Harta termasuk hal yang wajib dijaga dalam syariat, dan hak pemiliknya tidak gugur kecuali dengan sebab syar’i yang sah.”

- f. Pendapat al-Imām asy-Syāfi’ī tentang larangan gharar (ketidakjelasan) dan zalim, di kitab, *al-Umm*, juz 3, hlm. 29, Beirut: Dār al-Ma’rifah):

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْغَرَرُ كُلُّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ الْعَاقِبَةِ، أَوْ فِيهِ خَفَاءٌ يُؤَدِّي إِلَى الزَّعَاظِمِ وَالظُّلْمِ

Gharar 6manah setiap jual beli yang tidak diketahui akibatnya, atau mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa dan kezaliman.”

- g. Pendapat al-Imām an-Nawawī tentang haramnya jual beli yang ada ketidakjelasan dalam akad (gharar), di kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 10, hlm. 156, Beirut: Dār al-Ma’rifah):

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَالزَّعَاظِمِ وَالظُّلْمِ

“Para ulama telah sepakat tentang haramnya jual beli gharar. Sebab diharamkannya 6manah karena dapat menjerumuskan kepada pengambilan harta secara batil, menimbulkan perselisihan, dan kezaliman.”

- h. Pendapat al-Imām Ibn ‘Ābidīn tentang prinsip 7mana dan keadilan dalam Transaksi, di kitab *Radd al-Muhtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār*, juz 4, hlm. 67, Beirut: Dār al-Fikr):

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَابِدِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الرِّضَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِذَا فَقِدَ الرِّضَا بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَا يَجِلُّ الْمَالُ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ

“Prinsip dasar dalam muamalah 7manah adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Jika kerelaan hilang, maka akad menjadi batal, dan tidak halal harta diperoleh tanpa 7mana pemiliknya.”

- i. Pendapat al-Imām an-Nawawī tentang akad wadī‘ah yad ḍamānah (titipan yang dijamin), di kitab *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, juz 9, hlm. 351, Beirut: Dār al-Fikr.):

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ قَدْ اسْتَعْمَلَ الْوَدِيعَةَ أَوْ خَالَفَ فِيهَا، ضَمِنَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَدِّيًا فِي الْأَمَانَةِ

“Apabila orang yang menerima titipan (al-mustawda‘) menggunakan barang titipan itu atau melanggar ketentuannya, 7manah7 wajib menanggungnya (ḍāmin) berdasarkan kesepakatan para fuqaha, karena ia telah melampaui batas dalam menjaga 7manah.”

- j. Pendapat Imam Nawawi tentang barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya:

يَجِبُ التَّعْرِيفُ بِاللُّقْطَةِ سَنَةً، فَإِذَا لَمْ يُعْرِفْ صَاحِبُهَا جَازَ لِلْوَاجِدِ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا، مَعَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِذَا ظَهَرَ مَالِكُهَا

“Wajib mengumumkan barang temuan selama satu tahun. Jika pemiliknya tidak diketahui, maka penemu boleh memanfaatkannya, dengan syarat tetap wajib mengembalikannya jika pemiliknya muncul.”

- k. Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami tentang perpindahan kepemilikan kepada ahli waris, di kitab *Tuhfatul Mukhtaj*, Ibnu Hajar al Haetami, Juz 6 hal. 383):

إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَوْتِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ إِجْمَاعًا

“Kecuali setelah kematiannya benar-benar terbukti. Ketika kematiannya telah dipastikan, maka kepemilikan (hartanya) berpindah kepada ahli waris secara ijma”.

- l. Pendapat Ibn Qudāmah tentang harta terlantar, di kitab *al-Mughnī*, Jild 6: 337):

إِذَا لَمْ يُعْرِفْ مَالِكُ الْمَالِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ، صَارَ الْمَالُ مَالًا ضَائِعًا، وَيَكُونُ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ

“Apabila pemilik harta tidak diketahui dan tidak mungkin dijangkau, maka harta itu menjadi māl dā‘i‘ (harta terlantar), dan kewenangan pengelolaannya berpindah kepada penguasa untuk mengaturnya sesuai kemaslahatan kaum Muslimin.”

- m. Pendapat al-Māwardī tentang harta yang tidak diketahui dapat dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat, di kitab *al-Ahkām al-Sultāniyyah* (hlm. 233):

إِذَا لَمْ يُعْرِفْ مَالِكُ الْمَالِ بَعْدَ بَذْلِ الْجُهْدِ فِي التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ، جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ

“Jika setelah upaya maksimal pemilik harta tidak juga diketahui, maka penguasa boleh memasukkannya ke baitul māl untuk kemaslahatan kaum Muslimin”.

- n. Pendapat Imam Ibnu Abū Zahrah tentang definisi kepemilikan (*al-milkiyyah*), di *Muḥāḍarāt fī al-Milkiyyah wa Naẓariyyat al-‘Aqd* [Kairo: Dār el-Fikr al-‘Arabī]:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

“Pengkhususan seseorang terhadap harta menurut syara’ sehingga dia dapat mengendalikan pengelolaan dan mengambil manfaat darinya, selama tidak ada halangan syar’i.”

- o. Pendapat al-Tarmasy tentang hukum uang elektronik, di kitab *al-Mathba’ah al-‘Amirah al-Syarafiyyah bi Mishra al-Mahmiyyah*; juz IV], halaman 29-30):

وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْوَرَقَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالنُّوْطِ، فَعِنْدَ الشَّيْخِ سَالِمِ بْنِ سَمِيرٍ وَالْحَبِيبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمِيْطٍ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الدُّيُونِ، نَظَرًا إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْوَرَقَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ النُّقُودِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا. وَعِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَنْبَابِيِّ وَالْحَبِيبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَالْفُلُوسِ الْمَضْرُوبَةِ، وَالتَّعَامُلُ بِهَا صَحِيحٌ عِنْدَ الْكُلِّ. وَتَجِبُ زَكَاةُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَوْزَاقُ مِنَ النُّقُودِ عِنْدَ الْأَوَّلِينَ زَكَاةً عَيْنٍ، وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عِنْدَ الْآخِرِينَ فِي أَغْيَانِهَا إِذَا قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ.

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut-menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan,”

- p. Pendapat Imam Ghazali tentang transaksi itu sah jika ditetapkan oleh mufti atau pemerintah, di kitab *Ihya ulumidin*, Juz 1, hal. 420):

إِعْلَمُ أَنَّ الْمُعَامَلَةَ قَدْ تَجَرَّى عَلَى وَجْهِ يَحْكُمُ الْمُفْتِي بِصِحَّتِهَا وَأَنْعَادِهَا.....

“Ketahuilah bahwa suatu transaksi terkadang dilakukan dengan suatu bentuk yang disahkan oleh mufti.”

- q. Pendapat Muhammad bin Ahmad al-Syatiri tentang substansi akad, di kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafis* hal. 365):

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَافِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلِيفُونِ وَالتَّلَكُّسِ وَالْبَرْقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan”

- r. Penjelasan Wahbah al-Zuhaili bahwa tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak bagi makhluk, di kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dâr al-Fikr, 1985, juz 4, hlm. 299) :

لَيْسَ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ حَقًّا مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ، فَإِذَا تَرْتَبَ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ إِحْدَاثُ ضَرْرٍ بِالْغَيْرِ نَتِيجَةً إِسَاءَةٍ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْحَقِّ، كَانَ مُحْدِثُ الضَّرَرِ مَسْئُولًا.

“Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan buruknya pemfungsian harta, maka dampak kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan.”

- s. Kesepakatan pada Majma’ al-Fiqh al-Islāmī ad-Duwalī, Qarārāt Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, Sidang Tahunan ke-23, Jeddah: OKI, 2019. Tentang harta tak bertuan:

الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ أَصْحَابُهَا، وَمِنْهَا الْأَرْصَدَةُ النَّائِمَةُ، يَجِبُ فَصْلُهَا وَالْإِعْلَانُ عَنْهَا، وَتُدَارُ مِنْ قِبَلِ جِهَاتٍ رَسْمِيَّةٍ وَفَقًّا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمَصَالِحِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ الشَّرَكَاتِ

“Harta yang tidak diketahui pemiliknya -termasuk saldo rekening dorman- wajib dipisahkan dan diumumkan. Pengelolaannya harus dilakukan oleh lembaga resmi sesuai maqāsid al-syarī’ah dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau korporasi”.

- t. Definisi tsaman atau nuqud:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يُلْقَى قَبُولًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ لعبد الله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: المكتب الإسلامي، 1996، م، ص: 178)

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَصْنُوعَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمُطْبُوعَةِ وَنَحْوَهَا، الصَّادِرَةُ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ (محمد رأس قلعه جي) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار النفائس، ١٩٩٩ م، ص: ٢٣

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, al-Mu’amalat al-Maliyyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23).

2. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
3. Pedoman Umum DSN-MUI tentang Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah.
4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : FATWA TENTANG STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
 - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan; dan
 - d. merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
2. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana
3. Penerbit kartu (*issuer*) adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Keuangan Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain
5. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
6. Pengguna (Pemegang Kartu) adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau menggunakan kartu uang elektronik sebagai alat transaksi, baik yang terdaftar (*registered*) maupun tidak terdaftar (*unregistered*).
7. Kartu Uang Elektronik yang Hilang adalah kondisi di mana kartu uang elektronik tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik atau pengguna yang sah, baik karena terjatuh, dicuri, atau hilang tanpa diketahui keberadaannya.
8. Hilangnya Saldo adalah keadaan di mana saldo uang elektronik tidak dapat diakses atau digunakan oleh pengguna karena kesalahan sistem, gangguan teknis, serangan siber, atau kehilangan akun.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Saldo di dalam kartu uang elektronik pada prinsipnya adalah hak milik pembeli, meski datanya tersimpan dan/atau dikendalikan oleh *issuer* (penerbit kartu).
2. Jika kartu uang elektronik hilang, saldo yang ada pada kartu tersebut tetap menjadi hak pemilik kartu, dan pemilik kartu berhak meminta penerbit untuk mengembalikan saldo atau meminta dibuatkan kartu uang elektronik baru, karena secara sistem data dan saldo dari kartu yang hilang masih ada di *issuer* (penerbit kartu).
3. Jika kartu berstatus *unregister* dan tidak terdapat aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, maka *issuer* (penerbit kartu) wajib menempatkan saldo tersebut ke dalam pos dana sosial dan digunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan usaha.

4. Orang yang menemukan kartu uang elektronik tidak berhak untuk menggunakan saldo di dalamnya dan wajib mengembalikan kepada pemilik atau *issuer* (penerbit kartu).
5. Jika pemilik kartu uang elektronik tidak diketahui, orang yang menemukan wajib mengembalikan kepada *issuer* (penerbit kartu), untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut sebagaimana ketentuan pada angka 2 dan 3.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun regulasi mengenai ketentuan uang elektronik harus teregistrasi sehingga dapat lebih menjamin dan melindungi hak masyarakat.
2. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menyusun regulasi dan melakukan pengawasan terhadap dana nasabah yang potensial hilang serta menjamin pemanfaatan dana tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak atau untuk kepentingan publik.

Keempat

: Ketentuan Penutup

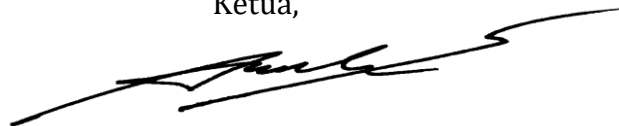
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Jumadal Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.

**PIMPINAN SIDANG KOMISI FATWA
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A

Sekretaris,



Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd

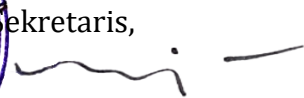
**PIMPINAN SIDANG PLENO
MUSYAWARAH NASIONAL XI MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



KH. Masduki Baidlowi, M.Si

Sekretaris,



Drs. H. Pasni Rusli

Tim Perumus :

1. Dr. KH. Afifuddin Muhajir
2. Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A
3. KH. Abdullah Jaidi
4. Dr. KH. Ahmad Fahrur Rozi Burhan, M.Pd
5. Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.A
6. KH. Junaidi
7. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.H., M.A
8. Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

9. KH. Miftahul Huda
10. Prof. Dr. H. Jaih Mubarok, MA
11. Dr. H. Umar Al Haddad MA
12. Dr. H. Aminuddin Yakub, MA
13. KH. Moh Romli
14. Dr. KH. Muhammad Alvi Firdausi
15. dr. Dr. H. Endy M Astiwara
16. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum